Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 30512-30522

Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kota Malang

Anif Diyan Firmansyah [1], Hayat [2], Septina Dwi Rahmawati [3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Corresponding Author: 22101091034@unisma.ac.id

Published: October , 2025

ABSTRACT
This study analyzes the implementation of the Dynamic Governance concept in managing Street Vendors at Malang City Square by Diskopindag. A descriptive qualitative approach was applied through interviews, observations, and documentation. The findings show three key dimensions: Thinking Ahead, reflected in plans to relocate vendors to Pasar Baru Barat; Thinking Again, in the shift from repressive control to empowerment; and Thinking Across, in cross-sector Collaboration with Satpol PP, the Transportation and Environmental Departments. However, implementation remains limited by weak coordination, lack of accurate data, low digital literacy, and minimal public participation. Strengthening data systems, inter-agency Collaboration, and vendor engagement is crucial to realizing adaptive and sustainable governance of Street Vendors in Malang.
Keywords: *Dynamic Governance, Street Vendors, Adaptive Governance, Collaboration, Malang City*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat setiap tahun karena faktor ekonomi, peluang kerja, dan harapan hidup yang lebih baik. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 penduduk perkotaan mencapai 56,7% dari total populasi (Hadijah dan Sadali, 2020). Namun, urbanisasi yang pesat ini tidak selalu diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat beralih ke sektor informal seperti buruh harian, pengemudi ojek, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Rohmah, 2022). Sektor ini berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta mendukung perputaran ekonomi lokal (Sibagariang et al., 2023; Octaviani dan Puspitasari, 2022).

Fenomena tersebut tampak jelas di Kota Malang, khususnya di kawasan Alun-Alun yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Letaknya yang strategis membuat kawasan ini menjadi lokasi favorit bagi PKL untuk berjualan dan menarik pengunjung dari berbagai kalangan. Namun, keberadaan PKL di ruang publik juga menimbulkan permasalahan ketertiban, kebersihan, dan estetika kota. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penataan sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 dan Nomor 2 Tahun 2012, yang menetapkan Alun-Alun sebagai zona bebas PKL. Meskipun demikian, jumlah PKL terus meningkat dan aktivitas mereka tetap

berlangsung karena faktor kebutuhan ekonomi dan belum tersedianya lokasi relokasi yang layak (Radar Malang, 2025; Larasati, 2021).

Dalam konteks tata kelola, penyelesaian masalah PKL tidak cukup dengan pendekatan regulatif semata, melainkan memerlukan penerapan prinsip dynamic governance yang adaptif dan partisipatif (Nurhidayah et al., 2019). Pendekatan ini menekankan tiga kemampuan utama, yaitu *think ahead* (berpikir ke depan), *think again* (meninjau ulang kebijakan), dan *think across* (belajar lintas sektor) (Rizki et al., 2023). Dengan berpikir ke depan, pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan PKL di masa mendatang dan menyediakan sentra kuliner yang terintegrasi dengan kawasan wisata. Sementara itu, berpikir ulang dan lintas batas memungkinkan evaluasi serta adopsi praktik terbaik dari kota lain dalam menata sektor informal secara berkelanjutan.

Penerapan dynamic governance diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan tata ruang kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor informal. Pemerintah perlu melibatkan PKL secara aktif dalam proses perencanaan agar kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang tidak hanya berfokus pada aspek penertiban, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat (Alfiyan, Afifuddin, & Hayat, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam penerapan *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Malang. Menurut Ajayi (2023), dalam penelitian kualitatif, sumber data umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memastikan kelengkapan, kedalaman, serta keandalan informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada strategi yang dikemukakan oleh Mtisi (2022), yang menekankan pentingnya penggunaan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan non-partisipatif, serta analisis dokumen. Kombinasi berbagai teknik tersebut melalui triangulasi metode diharapkan dapat meningkatkan validitas serta kedalaman hasil analisis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas atau non-partisipatif, dan studi dokumentasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (Miles, 2014:10). Model ini menekankan bahwa aktivitas analisis data tidak bersifat linier, melainkan berlangsung secara terus-menerus dan interaktif sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir (Qomaruddin & Sa'diyyah, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks dan dinamika yang muncul selama proses penelitian berlangsung.

HASIL

A. Penerapan Konsep *Dynamic Governance* dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang telah berjalan bertahap dan masih dalam proses penguatan kelembagaan. Kebijakan ini mencerminkan kemampuan adaptasi pemerintah dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan kebutuhan ruang publik di kawasan strategis kota. Implementasinya terlihat melalui tiga dimensi utama, yaitu *Thinking Ahead* (berpikir ke depan), *Thinking Again* (berpikir ulang), dan *Thinking Across* (berpikir lintas sektor), yang menunjukkan upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan, melibatkan berbagai pihak, serta

memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola PKL yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Wawancara mendalam dilakukan bersama Bapak Risman selaku perwakilan dari bidang pengelolaan dan pembinaan pedagang di Diskopindag Kota Malang dan Bapak Samara selaku Humas Diskopindag. Wawancara ini dilakukan memperoleh informasi terkait strategi implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi di lapangan Dokumentasi kegiatan wawancara tersebut dapat dilihat pada **Gambar 5.1. dan Gambar 5.2.**



Gambar 5.1. Wawancara dengan Bapak Risman (Bidang pengelolaan dan pembinaan pedagang di Diskopindag)

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025



Gambar 5.2. Wawancara dengan Bapak Samara (Humas Diskopindag)

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025

Implementasi konsep ini kemudian dianalisis melalui tiga dimensi utama *Dynamic Governance*, yaitu *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, dan *Thinking Across*, sebagaimana dijabarkan berikut ini.

1. *Thinking Ahead* (Berpikir ke Depan)

Dimensi *Thinking Ahead* dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang terlihat dari upaya Diskopindag menyiapkan kebijakan jangka panjang berupa rencana relokasi pedagang ke kawasan Pasar Baru Barat sebagai langkah penataan ruang publik yang lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam wawancara, Bapak Risman selaku perwakilan Bidang Pembinaan Pedagang menyampaikan, *"Memang ada wacana untuk memindahkan pedagang ke Pasar Baru Barat karena di sana masih banyak area kosong di lantai 1 dan 2."* (Wawancara, 10 Oktober 2025). Namun, ia juga menegaskan bahwa sosialisasi belum

dilakukan karena rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan menunggu kesiapan lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memiliki visi ke depan, proses komunikasi publik dan pelibatan PKL masih terbatas. Dengan demikian, penerapan *Thinking Ahead* baru sebatas perencanaan konseptual dan perlu diperkuat melalui sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta penggunaan data akurat agar sejalan dengan prinsip *Dynamic Governance* yang partisipatif dan adaptif.

2. ***Thinking Again*** **(Berpikir Ulang)**

Berdasarkan hasil wawancara, dimensi *Thinking Again* dalam pengelolaan PKL di Kota Malang tampak dari upaya Diskopindag merefleksikan kebijakan lama dan beralih dari pendekatan represif menuju pembinaan yang lebih humanis. Bapak Risman, perwakilan bidang pembinaan pedagang, menjelaskan bahwa pemerintah kini mengutamakan pendampingan dan edukasi dibanding penertiban langsung. Ia menyampaikan, *"Kami lebih berfokus pada pembinaan dan pendampingan agar pedagang bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan yang berlaku. Kalau soal penindakan, itu kewenangan Satpol PP."* (Wawancara, 10 Oktober 2025). Temuan ini menunjukkan adanya proses evaluasi kebijakan di tubuh Diskopindag sebagai bentuk pembelajaran kelembagaan, meskipun refleksi tersebut masih bersifat internal dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, prinsip *Thinking Again* dalam *Dynamic Governance* perlu diperkuat melalui evaluasi berbasis data dan dialog partisipatif antara pemerintah dan pedagang agar kebijakan penataan menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan.

3. *Thinking Across* (Berpikir Lintas Sektor)

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan dimensi *Thinking Across* dalam pengelolaan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang tercermin dari upaya Diskopindag dalam membangun koordinasi lintas instansi seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak kepolisian. Bapak Risman, perwakilan bidang pengelolaan dan pembinaan pedagang, menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembinaan selalu diawali dengan surat koordinasi kepada instansi terkait agar penanganan di lapangan berjalan sesuai prosedur. Ia menjelaskan, *"Sebelum kami melakukan pembinaan kepada para PKL, kami selalu mengirim surat terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, seperti Satpol PP, Dishub, dan DLH. Kalau di lapangan ternyata dibutuhkan tindakan yang lebih tegas, kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian."* (Wawancara, 10 Oktober 2025). Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antarinstansi telah berjalan, kolaborasi tersebut masih bersifat administratif dan belum terintegrasi secara digital, sehingga efektivitas pengawasan dan pembinaan belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip *Thinking Across* dalam *Dynamic Governance* perlu diperkuat melalui sistem koordinasi berbasis data dan komunikasi lintas sektor yang lebih adaptif.

B. Perspektif Pedagang Kaki Lima terhadap pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang

Selain wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan para PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang untuk memperoleh gambaran kondisi faktual di lapangan. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka pada tanggal 25 Oktober 2025 di sekitar area Alun-Alun Kota Malang yang saat itu sedang dalam tahap renovasi. Dokumentasi kegiatan wawancara tersebut ditampilkan pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.



Gambar 5.3. Wawancara dengan Bapak Darno selaku PKL di Alun-Alun Kota Malang
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025



Gambar 5.3. Wawancara dengan Ibu Ariya selaku PKL di Alun-Alun Kota Malang
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di kawasan Alun-Alun Kota Malang, ditemukan bahwa aktivitas perdagangan tetap berlangsung meskipun kebijakan pelarangan sudah diterapkan. Salah satu pedagang, Bapak Darno yang telah berjualan soto ayam sejak tahun 1991, mengungkapkan bahwa ia dan pedagang lain tetap berjualan dengan berpindah tempat saat ada penertiban dari Satpol PP, lalu kembali lagi ketika situasi memungkinkan. Ia menyampaikan, *"Biasanya kalau ada Satpol PP datang, kami pindah dulu ke seberang jalan, tapi kalau sudah sepi ya balik lagi ke tepi Alun-Alun."* (Wawancara, 25 Oktober 2025). Selain itu, ia menuturkan belum pernah mendapat pelatihan atau pembinaan dari Diskopindag dan berharap pemerintah menyediakan lokasi berjualan yang legal namun tetap strategis agar pedagang tidak terus berpindah. Hasil wawancara ini menggambarkan bahwa para PKL masih menghadapi ketidakpastian lokasi, belum memperoleh dukungan pembinaan, serta kurang mendapat informasi kebijakan penataan, sehingga menegaskan perlunya pendekatan pemerintah yang lebih partisipatif dan berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Dynamic Governance*

1. Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Dynamic Governance* dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang didukung oleh dua faktor utama, yaitu kolaborasi lintas instansi dan komitmen pemerintah terhadap pendekatan pembinaan. Diskopindag menjalin kerja sama dengan Satpol PP, Dishub, dan DLH dalam pelaksanaan penataan serta pembinaan PKL. Seperti disampaikan oleh Bapak Risman, *"Sebelum melakukan pembinaan, kami selalu mengirim surat koordinasi ke Satpol PP, Dishub, dan jika diperlukan tindakan lebih tegas, kami juga melibatkan kepolisian."* (Wawancara, 10 Oktober 2025). Selain itu, pemerintah lebih menekankan pembinaan dan pemberdayaan dibanding penindakan hukum. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju tata kelola yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, sejalan dengan prinsip *Dynamic Governance* yang adaptif dan kolaboratif.

2. Faktor Penghambat

Meskipun penerapan konsep *Dynamic Governance* dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang telah menunjukkan arah positif, masih terdapat berbagai hambatan seperti minimnya sosialisasi kebijakan, ketiadaan data akurat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesiapan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Risman selaku perwakilan Diskopindag (10 Oktober 2025), beliau menyampaikan bahwa hingga saat ini rencana relokasi PKL ke Pasar Baru Barat masih berada pada tahap wacana internal dan belum dilakukan sosialisasi resmi kepada pedagang karena pemerintah menunggu kesiapan lokasi serta administrasi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Thinking Ahead* dan *Thinking Across* belum berjalan optimal, karena keterbatasan komunikasi publik, belum tersedianya sistem informasi terpadu, serta kurangnya pelibatan pedagang dalam proses perencanaan. Akibatnya, implementasi kebijakan masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya adaptif, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan basis data, serta pembinaan partisipatif agar pengelolaan PKL dapat sejalan dengan prinsip tata kelola yang dinamis dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Dynamic Governance dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Malang

Penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Malang menunjukkan adanya proses adaptasi kebijakan yang masih berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan responsivitas terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah melalui Diskopindag berupaya membangun tata kelola yang adaptif sesuai pandangan Rahmat (2022) bahwa birokrasi perlu berpikir fleksibel agar kebijakan publik responsif terhadap perubahan. Namun, keterbatasan data, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi publik menunjukkan bahwa prinsip *agile governance* belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana diungkapkan Setiadi (2019) bahwa hambatan utama terletak pada lemahnya integrasi dan budaya birokrasi konvensional.

1. ***Thinking Ahead*** **(Berpikir ke Depan)**

Dimensi *Thinking Ahead* dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya perencanaan jangka panjang melalui rencana relokasi ke Pasar Baru Barat sebagai langkah menuju tata kelola berkelanjutan (Nurizwan, 2018). Namun, kebijakan ini masih bersifat konseptual karena lemahnya koordinasi lintas sektor, kesiapan administratif, dan ketiadaan data akurat, sehingga berisiko tidak tepat sasaran (Setiadi, 2019; Rahmat, 2022). Selain itu, minimnya komunikasi publik berpotensi menimbulkan resistensi dari pedagang,

padahal partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan *Thinking Ahead* (Kamil, 2021). Oleh karena itu, penguatan integrasi data, koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi yang inklusif diperlukan agar prinsip *Dynamic Governance* dapat terwujud secara efektif.

2. *Thinking Again* (Berpikir Ulang)

Dimensi *Thinking Again* menekankan kemampuan pemerintah untuk merefleksikan dan menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan PKL di Kota Malang, Diskopindag telah beralih dari pendekatan represif menjadi pembinaan yang lebih humanis sebagai bentuk pembelajaran kelembagaan (Nurizwan, 2018; Kamil, 2021). Langkah ini menunjukkan adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi pedagang dan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Meski demikian, refleksi kebijakan masih terbatas secara internal tanpa pelibatan publik yang luas, sehingga belum sepenuhnya berbasis data dan evaluasi kinerja (Rahmat, 2022; Setiadi, 2019). Untuk memperkuat *Thinking Again*, pemerintah perlu membangun mekanisme monitoring berbasis data dan membuka dialog lintas sektor agar evaluasi kebijakan lebih partisipatif dan inovatif.

3. Thinking Across (Berpikir Lintas Sektor)

Dimensi *Thinking Across* mencerminkan kemampuan pemerintah membangun kolaborasi lintas sektor secara terintegrasi. Dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang, Diskopindag telah bekerja sama dengan Satpol PP, Dishub, dan DLH, namun koordinasinya masih bersifat administratif tanpa dukungan sistem digital terpadu, sehingga tindak lanjut di lapangan belum efisien (Setiadi, 2019; Kamil, 2021). Keberhasilan *Thinking Across* menuntut koordinasi adaptif berbasis teknologi (Rahmat, 2022), sehingga diperlukan digitalisasi data, forum koordinasi berkelanjutan, dan SOP terpadu antarinstansi. Sejalan dengan pandangan Nurizwan (2018) dan Kapolres Malang (Detik.com, 2023), penguatan komunikasi digital menjadi kunci terciptanya tata kelola lintas sektor yang responsif dan sesuai prinsip *Dynamic Governance*.

B. Perspektif Pedagang Kaki Lima terhadap Pengelolaan PKL di Kawasan Alun-Alun Kota Malang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang di Alun-Alun Kota Malang tetap bertahan karena tingginya minat pembeli, meskipun menghadapi ketidakpastian akibat penertiban dan minimnya pembinaan dari pemerintah. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan kebijakan yang masih top-down. Prinsip *dynamic governance* yang menuntut adaptivitas dan kolaborasi belum sepenuhnya diterapkan, terlihat dari lemahnya sosialisasi, partisipasi, serta koordinasi lintas sektor (Nurizwan, 2018; Setiadi, 2019; Kamil, 2021). Selain itu, ketiadaan data akurat tentang jumlah dan sebaran PKL memperumit penataan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendataan digital, membangun forum komunikasi partisipatif, dan menyediakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas ekonomi pedagang.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Dynamic Governance

1. Faktor Pendukung

Implementasi *dynamic governance* dalam pengelolaan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Malang didukung oleh sinergi antarinstansi seperti Diskopindag, Satpol PP, Dishub, dan DLH yang mencerminkan penerapan prinsip *thinking across*, yaitu kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan publik. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting bagi tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi perkotaan, sebagaimana ditemukan oleh Pangestu (2020) dalam studi di Kota Batu. Selain itu, komitmen Diskopindag terhadap pendekatan pembinaan dibandingkan penindakan menunjukkan penerapan prinsip *thinking again*, yakni kemampuan birokrasi untuk belajar dan menyesuaikan kebijakan secara reflektif. Pendekatan humanis ini sejalan dengan temuan Fajri (2019) di Makassar yang menegaskan efektivitas kolaborasi sosial dalam mewujudkan tata kelola publik yang dinamis. Di sisi lain, rencana

relokasi PKL ke Pasar Baru Barat menjadi wujud *thinking ahead*, yaitu orientasi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, sejalan dengan penelitian Jafa (2022) yang menekankan pentingnya perencanaan kolaboratif lintas sektor sebagai strategi pembangunan yang adaptif terhadap perubahan sosial.

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Malang meliputi minimnya sosialisasi kebijakan, ketiadaan data akurat, rendahnya literasi digital, lemahnya keterlibatan masyarakat, serta kurangnya integrasi antar-dinas. Kurangnya sosialisasi membuat kebijakan bersifat top-down dan menimbulkan resistensi sosial (Wahyundi, 2024), sementara ketiadaan basis data PKL menghambat perencanaan berbasis bukti (Arifin, 2020). Rendahnya literasi digital dan komunikasi konvensional antarinstansi memperlambat koordinasi dan keputusan (Ichsan, 2022), sedangkan keterbatasan kesiapan sosial masyarakat memperlihatkan belum terinternalisasinya dimensi sosial dalam kebijakan publik (Banul et al., 2022). Selain itu, lemahnya integrasi lintas dinas menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi birokrasi (Setiawan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi publik, digitalisasi sistem informasi, pemberdayaan sosial, serta koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan konsep *dynamic governance* dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan. Penerapan tiga dimensi utama Dynamic Governance, yakni *Thinking Ahead, Thinking Again*, dan *Thinking Across*, telah mulai terlihat dalam praktik kebijakan. Dimensi *Thinking Ahead* tercermin dari perencanaan relokasi PKL ke kawasan Pasar Baru Barat, *Thinking Again* dari pergeseran kebijakan penertiban menjadi pembinaan, serta *Thinking Across* dari bentuk kolaborasi lintas instansi, seperti Diskopindag, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan data yang akurat, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta minimnya partisipasi dan pelatihan bagi pedagang. Akibatnya, manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Dengan demikian, penerapan *dynamic governance* di Kota Malang perlu diperkuat melalui pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi, peningkatan komunikasi publik, perluasan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan PKL dapat berlangsung secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, S.K., 2024. The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, *2*, p.100051.

Ajayi, V.O. (2023) 'A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data', *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), pp. 1–7. Available at: www.ej-edu.orgdoi:http://dx.doi.org/19810.21091/.

Alfianti, N. Z., Purnawati, D., Akmal, F., Rizki, M. F., & Islamiyah, Q. (2019). *Manajemen pelayanan publik* (Hayat, Ed.). DINUN Library & Publishing.

Alfiyan, M. Y., Afifuddin, A., & Hayat, H. (2019). PERANAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto). *Respon Publik*, *13*(5), 101-109.

Arifin, A. M., Setyawan, D., Rohman, A., (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi).

Asta, M. N. K., Turrodiyah, L., Ayu, J. P. M., Alisa, S. P., & Ramadhan, D. S. (2019). *Kebijakan dan pelayanan publik* (Hayat, Ed.). DINUN Library & Publishing.

Banda, L.G. (2024) 'A commentary on Manazir non-linear policy process model', *SN Social Sciences*, 4(12), pp. 1–6. Available at: https://doi.org/10.1007/s43545-024-01030-4.

Dzaky, F., Saroh, S., & Zunaida, D. (2024). STRATEGI BAURAN PEMASARAN 4P PADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)(Studi Pada PKL Sempol Di Sekitar Alun–Alun Kota Batu). *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, *13*(2), 234-243.

Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat, H. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *9*(1), 74-78.

Fitriana, R., Auliya, A.U. and Widiyarta, A. (2020) 'Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif', *Jurnal Governansi*, 6(2), pp. 93–103. Available at: https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863.

Goyal, N. (2021) 'Explaining Policy Success Using the Multiple Streams Framework: Political Success Despite Programmatic Failure of the Solar Energy Policy in Gujarat, India', *Politics and Policy*, 49(5), pp. 1021–1060. Available at: https://doi.org/10.1111/polp.12426.

Hadijah, Z. and Sadali, M.I. (2020) 'Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(3), pp. 290–306. Available at: https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306.

Hayat, H. (2014). Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *HUNAFA Jurnal Studia Islamika* , *11* (2), 293-314.

Hayat, H. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *20*(2), 175-188.

Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, *8*(1), 1-26.

Hayat, H., & Artisa, R. A. (2019, August). Implementation of public service performance appraisal model. In *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)* (pp. 49-55). Atlantis Press.

Hayat, H., & Salamah, U. (2019). Hukum Dan Kebijakan Publik. *Refika Aditama. Diakses* pada *25* Februari 2022.

Hayat, H., Rudianto, R., Muchsin, S., & Afifuddin, A. (2023). The implementation of the Regional Development Plan policy focuses on developing the potential of empowered villages in Batu City. *ARISTO*, *12*(1), 204-231.

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Malang: Rajawali Press.

Hayat. (2018). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang: Empatdua Media.

HERITAGE KAYUTANGAN KOTA MALANG.

Imayati, S. N., Hayat, H., & Sunariyanto, S. (2023). Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *9*(2), 211-220.

Jafa, B. J. (2023). Dynamic Governance Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, IPDN JATINANGOR).

Kamil, M., Roziqin, A., & Rahmawati, Y. (2021). DynaMic Governance Model Within Integrated Waste ManageMent in Malang City: Agile People And Process In Action. Jurnal Studi Pemerintahan, 312-330.

Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F. and Santoso, E. (2021) 'Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur', *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307.

Lane, J.-E. (2022) 'Authoritative Allocation of Values', *International Business & Economics Studies*, 4(4), p. p1. Available at: https://doi.org/10.22158/ibes.v4n4p1.

Larasati, D.C. (2021) 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)', *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), pp. 193–201. Available at: https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313.

Marwiyah, S., Hasan, M.M. Marga, U.P. (2025) 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013', 5, pp. 3908–3914.

Mtisi, S. (2022) 'The Qualitative Case Study Research Strategy as Applied on a Rural Enterprise Development Doctoral Research Project', *International Journal of Qualitative Methods*, 21, pp. 1–13. Available at: https://doi.org/10.1177/16094069221145849.

Mustafa, G., Yaseen, Z., Arslan, M., Imran, M., & Nisa, Z. U. (2021). Theoretical approaches to study the public policy: an analysis of the cyclic/stages heuristic model. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, *18*(10), 1307-1321.

Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Mamuju. 1 (1), 145ñ161*.

Nurhidayah, R., Nadia, K. H., Oktavia, M. B., Fajar, H. A., & Putri, R. A. K. (2019). Inovasi dan Kinerja Pelayanan Publik (Hayat, Ed.). DINUN Library & Publishing.

Nurizwan, S., & Dewi, U. (2018). Dynamic Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Resort Pengelolaan Hutan Mangunan Kabupaten Bantul. Natapraja, 6(2), 209-220.

Octaviani, S.L. and Puspitasari, A.Y. (2022) 'Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima', *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), p. 130. Available at: https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991.

Putri, M. A., Mefiana, N. S., Ambarwati, P. A., Hermawan, R. P., & Amira, Z. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Alun-Alun Lembang. *Jurnal Pariwisata Dan Perhotelan*, *1*(3), 14-14. https://doi.org/10.47134/pjpp.v1i3.2522.

Qomaruddin, Q. dan Sa'diyah, H., 2024. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), pp.77-84.

Rahmat, Mochammad Rozikin, Suryadi. 2022. "COLLABORATIVE GOVERNANCE" PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 6, No. 5, Hal. 318-323 |

Rifai, A., Hayat, H., & Anadza, H. (2025). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik:(Studi pada Kantor Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung). *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, *6*(2), 269-285.

Rizki, M., Sujianto, S. and Asari, H. (2023) 'Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), pp. 321–338. Available at: https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.5745.

Rohmah, O.I., 2022. *STRATEGI PEKERJA INFORMAL PERKOTAAN DALAM BERTAHAN HIDUP SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Studi Kasus Kampung Markisa, Blunyahrejo, Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Septiawan, F.A. and Ubaidillah, L. (2024) 'Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), p. 12. Available at: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815.

Setiadi, R. J., & Subowo, A. (2025). DYNAMIC GOVERNANCE DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) GRHA TIYASA KOTA BOGOR. Journal of Public Policy and Management Review, 14(2), 698-715.

Sibagariang, F. A., Mauboy, L. M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023) 'Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022', *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), pp. 151–160. Available at:

https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1892.
Stouten, J., Rousseau, D.M. and De Cremer, D. (2018) *Successful organizational change: Integrating the management practice and scholarly literatures*, *Academy of Management Annals*. Available at: https://doi.org/10.5465/annals.2016.0095.
Syahputri, A.Z., Fallenia, F. Della and Syafitri, R. (2023) 'Kerangka berfikir penelitian kuantitatif', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), pp. 160–166.
Tefa, G. and Purbosiwi, P.D. (2023) 'Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Tatapamong*, 5(September), pp. 162–176. Available at: https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698.
Ulfa, N., Fian, S., Hidayatullah, R., Amrullah, J., Putri, A., Ulum, K., Samsih, B. and Astono, T. (2024) 'Strategi Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Upaya Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima', 4, pp. 2471–2482.
Wahyundi, B. F. D. (2024). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang).
Waruwu, M. (2024) 'Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan', *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), pp. 198–211. Available at: https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236.
Wei, C. and Dong, Z. 2024. Analysis of the Implementation of Double Reduction Policy Based on Smith Policy Execution Model. Social Security and Administration Management, 5(1), pp. 73-77.
Wijaya, A. A. M., Hanifa, L., Hastuti, H., & Maryasih, L. (2020). Street vendors resiliencies: The role of social capital and community governance. In *Proceedings Aceh Global Conference-Business, Economics, and Sustainable Development Trends* (Vol. 2, pp. 37-41).
Wilkins, A.W. and Mifsud, D. (2024) 'What is governance? Projects, objects and analytics in education', *Journal of Education Policy*, 39(3), pp. 349–365. Available at: https://doi.org/10.1080/02680939.2024.2320874.
Yolawati, Fauzi, A., Alvia, E. T., Adiningsih, A., & Kurniawan, Y. B. (2019). *E-government & e-publik service* (Hayat, Ed.). Akademia Pustaka.